

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Budiastuti, D. (2022). Validitas dan reliabilitas penelitian.

Hermawan, I., & Pd, M. (2019). *Metodologi penelitian pendidikan (kualitatif, kuantitatif dan mixed method)*. Hidayatul Quran.

Mappasere, S. A., & Suyuti, N. (2019). Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif. *Metode Penelitian Sosial*, 33.

Unynets-Khodakivska, V., Prystupa, L., Ivanyshyna, O., Panura, I., & Tuchak, T. (2023). Implementation of digital technologies in Public Administration. *Revista de La Universidad Del Zulia*. <https://doi.org/10.46925//rdluz.39.16>

Wiratmoko, S. A., & Busro, A. (2022). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kota Pasuruan. *Notarius*, 15(1), 120-132.

### Jurnal

Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.

Afdila, A., & Adnan, M. F. (2022). Digitalisasi Administrasi Publik Sebagai Salah Satu Perwujudan Reformasi Birokrasi. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 2(2), 27-32.

Ahmad, H., Sutaryono, M., & Aisyah, N. (2020). Pemanfaatan Smart PTSL sebagai instrumen pengumpul, pengolah dan pengintegrasikan data fisik dan data yuridis pendaftaran tanah sistematis lengkap. *Tunas Agraria*, 3(3).

- Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.
- Arsyad, E. G., & Rachmawati, I. (2024). Implementasi Kebijakan Pelayanan Online Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi. *JPM MOCCI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi, Sosial Sains dan Sosial Humaniora, Koperasi, dan Kewirausahaan*, 2(1), 27-46.
- Atrbpn.go.id. *Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga*. Diakses pada 3 Desember 2024, dari <https://kab-purbalingga.atrbpn.go.id/>
- Erlianti, D. (2019). Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis (JaPaBis)*, 1(1).
- Fajarwati, A., & Rahmadilla, U. (2022). Model Implementasi Kebijakan Merilee Grindle. *Dialog*, 7(1), 123-133.
- Ferdinan, A., Listyorini, T., & Supriyati, E. (2023). Implementasi dan Digitalisasi Sistem Administrasi Desa di Kantor Desa Kedungcino Kecamatan Jepara. *JUMINTAL: Jurnal Manajemen Informatika dan Bisnis Digital*, 2(1), 96-105.
- Fildza, S., & Noor, M. (2022). Implementasi Kebijakan Go Digital Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 19(2), 01-18.
- Ghufron, G. (2018, September). Revolusi Industri 4.0: Tantangan, Peluang, dan solusi bagi dunia pendidikan. In *Seminar Nasional Dan Diskusi Panel Multidisiplin Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2018* (Vol. 1, No. 1).
- Hanin, F. (2017). *Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Oublik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

- Irfan, B., & Anirwan, A. (2023). Pelayanan Publik Era Digital: Studi Literatur. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 4(1), 23-31.
- Kemenkeu.go.id. (2019). Sekilas Mengenal Aplikasi Sentuh Tanahku. Diakses pada 24 November 2023, dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-metro/baca-artikel/12931/Sekilas-Mengenal-Aplikasi-Sentuh-Tanahku.html>
- Kurniawan, W., & Maani, K. D. (2019). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik*, 1(4), 67-78.
- Lailiyah, K. (2022). Digitalisasi Desa Sebagai Upaya Percepatan Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance. *RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi Dan Teknologi Kabupaten Batang*, 6(2), 26-34.
- Maharani, J., & Suryani, D. A. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Pembangunan Kalurahan Berdasarkan UU Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 11(2), 157-168.
- Mardiyani, S. A., Sari, D. N., Koti, S., Cahyati, R., Safitri, H., Aziz, M. A., ... & Sukmana, P. E. (2020). Digitalisasi Desa Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Dan Informasi. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 1(3), 188-192.
- Pangalila, Y., Kaawoan, J., & Kumayas, N. (2019). Implementasi Kebijakan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Tomohon. *JURNAL EKSEKUTIF*, 3(3).
- Ppid.atrbpn.go.id. *Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga*. Diakses pada 3 Desember 2024, dari <https://ppid.atrbpn.go.id/kantor/pertanahan/purbalingga>

Saifudin, S., & Rahmawati, M. A. (2022). Digitalisasi Administrasi Perpajakan: Implementasi di KPP Pratama Semarang Selatan. *Jurnal HUMMANSI (Humaniora, Manajemen, Akuntansi)*, 5(2), 70-80.

Sampoerna, U. (2022). *Teknik Purposive Sampling: Definisi, Tujuan, dan Syarat*.

Setijaningrum, E. (2009). Inovasi Pelayanan Publik

Setyawan, D., & Srihardjono, N. B. (2016). Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa Dengan Model Edward III Di Desa Landungsari Kabupaten Malang. *Reformasi*, 6(2).

Suyadnya, I. D. P. (2024). Implementasi Digitalisasi Administrasi Pendidikan di SMP Negeri 3 Bangli. *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 4(1), 38-54.

Tasyah, A., Lestari, P. A., Syofira, A., Rahmayani, C. A., Cahyani, R. D., & Tresiana, N. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital (E-Government) di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 18(2), 212-224.

Teori, E. S. M. (2009). *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Waruwu, M. (2024). Pendekatan penelitian kualitatif: Konsep, prosedur, kelebihan dan peran di bidang pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198-211

Widiyanti, W. (2017). Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok. *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, 17(2), 132-138.

**Peraturan**

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023, tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

